

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik (prinsipal, dalam hal ini pemegang saham) mempekerjakan seseorang (agen) untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan beberapa kebijakan dalam pengambilan keputusan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri karena pada dasarnya sifat manusia sebagai makhluk individu sehingga menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*.

Perbedaan tujuan itulah yang mengakibatkan terjadinya *conflict of interest* diantara pihak agen dan principal. Hal inilah yang mendorong terjadinya asimetri informasi diantara kedua belah pihak tersebut. Kondisi ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan informasi yang diterima oleh investor sehingga hal itu akan mendorong perilaku manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari investor.

Untuk mengurangi kemungkinan kecurangan laporan keuangan di butuhkan *Corporate governance* yang baik. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk mengurangi kecurangan pada laporan keuangan.

Corporate governance merupakan respon perusahaan terhadap konflik tersebut. Aspek-aspek *corporate governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Rustiarini, 2010:4).

Teori agensi berhubungan erat dengan *Good Corporate Governance* karena hal ini berkaitan dengan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* dalam mengelola suatu perusahaan. Manajer yang merupakan *Agent* diberikan wewenang oleh pemegang saham yang bertindak sebagai pihak *principal* untuk melakukan operasional perusahaan, sehingga *agent* lebih banyak memiliki informasi dibandingkan *principal*. Hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut yang disebut dengan asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi ini, memungkinkan bagi *agent* untuk melakukan manipulasi data dalam pengungkapan informasi yang menurutnya tidak diharapkan oleh *principal*.

Menurut Scott (2000) dalam Lisa (2012:44), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kecurangan (*fraud*) didefinisikan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Kecurangan pelaporan keuangan menurut ACFE (2010) adalah tindakan yang dilakukan pejabat secara sengaja atas informasi yang material dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan sebenarnya dan akan memberikan suatu keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan. Namun, kecurangan dalam bentuk salah saji material laporan keuangan akan merugikan investor dan kreditor (ACFE, 2010). Apabila seseorang telah terbukti melakukan kecurangan, maka dia akan mencari alasan agar ia tidak disalahkan. Hal ini biasa disebut dengan pembenaran (*rationalization*). Beneish (2012) menyatakan bahwa manipulasi laba ditunjukkan dengan peningkatan atas pendapatan atau penurunan atas beban perusahaan secara signifikan dari tahun saar ini ke tahun sebelumnya.

Rezaee (2005) mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan menyajikan dan merekayasa nilai material dari laporan keuangan. Manipulasi keuntungan (*earning manipulation*) disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor .

Menurut Direktorat Utama Pembinaan dan pengembangan Hukum BPK, sebagaimana terdapat dalam Efitasari (2013), secara umum unsur-unsur kecurangan adalah:

- a. harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- b. dari suatu masa lampau (*past*) dan sekarang (*present*);
- c. fakta bersifat material (*material fact*);
- d. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan
- e. dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak bersaksi;

- f. pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan (*misrepresentation*);
- g. yang merugikannya (*detriment*).

Kecurangan (*fraud*) dalam lingkungan bisnis oleh Albrechth dan Albrechth (2002) seperti dikutip dalam Efitasari (2013), diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:

a. *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis *fraud* ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung.

b. *Management fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Jenis *fraud* ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan.

c. *Investment scams*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu/perorangan kepada investor. Jenis *fraud* ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.

d. *Vendor fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang dan jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.

e. *Customers fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan memberikan kepada

pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan sedikit dari yang seharusnya.

Menurut Dechow *et al* (2007) kecurangan laporan keuangan dapat dideteksi dengan menggunakan *fraud score model*, atau yang lebih dikenal dengan F-Score. Komponen variabel pada F-Score meliputi dua hal yang dapat dilihat di laporan keuangan, yaitu *accrual quality* yang diproksikan dengan *RSST accrual*, *financial performance* yang diproksikan dengan perubahan pada akun piutang, perubahan pada akun persediaan, perubahan pada akun penjualan tunai, perubahan pada EBIT.

Model F-Score merupakan penjumlahan dari dua variabel yaitu kualitas akrual dan kinerja keuangan (Skousen dan Twedt, 2009), dapat digambarkan dalam persamaan berikut:

$$\mathbf{F-Score} = \mathbf{Accrual\ Quality} + \mathbf{Financial\ Performance}$$

Dasar akrual dalam laporan keuangan memberikan peluang untuk manajer memanipulasi laporan keuangan untuk menghasilkan jumlah laba yang mereka inginkan (Dechow *et al.*, 2007). Kualitas akrual diproksikan dengan RSST akrual (Richardson *et al.*, 2004) yaitu dengan mendefinisikan semua perubahan non-kas dan non-ekuitas dalam suatu neraca perusahaan sebagai akrual dan membedakan karakteristik keandalan *working capital* (WC), *non-current operating* (NCO) dan *financial accrual* (FIN) serta komponen aset dan kewajiban dalam jenis akrual.

Kualitas akrual diukur melalui RSST akrual dengan menghitung perubahan aset lancar (tidak termasuk kas), dikurangi perubahan dalam kewajiban lancar (tidak termasuk utang jangka pendek) dan penyusutan, juga memperhitungkan perubahan *long-term operating assets* dan *long-term operating liabilities*. Model perhitungannya:

$$\mathbf{RSST\ accrual} = \frac{(\Delta\mathbf{WC} + \Delta\mathbf{NCO} + \Delta\mathbf{FIN})}{\mathbf{Average\ Total\ Assets}}$$

WC = (*Current Assets – Current Liabilities*)

NCO = (*Total Assets – Current Assets – Long Term Investment*) – (*Total Liabilities – Current Liabilities – Long Term Debt*)

FIN = (*Total Investment – Total Liabilities*)

ATS = (*Beginning Total Assets + End Total Assets*)

2

Keterangan:

WC : *Working Capital*

NCO : *Non Current Operating Accrual*

FIN : *Financial Accrual*

ATS : *Average Total Assets*

Financial performance dari suatu laporan keuangan dianggap mampu memprediksi terjadinya kecurangan laporan keuangan (Skosen dan Twedt, 2009).

Model perhitungannya yaitu:

Financial Performance = Change in receivables + Change in inventories + Change in cash sales + Change in earnings

Keterangan:

$$\text{Change in receivables} = \frac{\Delta \text{Receivables}}{\text{Average Total Assets}}$$

$$\text{Change in inventories} = \frac{\Delta \text{Inventories}}{\text{Average Total Assets}}$$

$$\text{Change in cash sales} = \frac{\Delta \text{Sales}}{\text{Sales (t)}} - \frac{\Delta \text{Receivables}}{\text{Receivables (t)}}$$

$$\text{Change in earnings} = \frac{\text{Earning (t)}}{\text{Average Total Assers (t)}} - \frac{\text{Earnings (t - 1)}}{\text{Average Total Assets (t - 1)}}$$

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Beberapa pendapat mengenai definisi manajemen laba diungkapkan berikut ini. Menurut Setiawati dan Na'im (2002) dalam Arfani dan Sasongko (2005) manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Menurut Sulistyanto (2008) pengertian manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Menurut Scott (2009) manajemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan.

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu manajer perusahaan untuk menaikkan, menurunkan, ataupun melakukan perataan laba suatu perusahaan. Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, seperti menunjukkan laba yang terus meningkat setiap tahun yang menunjukkan keberhasilan dari suatu perusahaan. Hal ini dapat menarik para investor-investor

untuk dapat menanamkan modal atau dana yang sangat besar di suatu perusahaan tersebut.

Manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan akan laba yang terus meningkat dan nilai pasar perusahaan yang naik pada jangka waktu tertentu, sehingga mereka dikontrak kembali untuk menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya. Kurangnya informasi dan pengetahuan pemilik perusahaan dan pihak eksternal perusahaan seperti investor, serta terpusatnya perhatian pemilik perusahaan dan investor terhadap laba seringkali mendorong manajer untuk memanipulasi laba. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya potensi pelanggaran dan kejahatan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Namun, manajemen laba tidak selalu menjadi upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada memanipulasi data akuntansi, tetapi lebih cenderung terhadap pemilihan metode akuntansi yang dipilih oleh pihak manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP (Lidya, 2015). Laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan merupakan sinyal bagi para pengguna laporan keuangan perusahaan terutama investor mengenai laba perusahaan di masa mendatang. Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan dapat memprediksi laba yang akan datang didasarkan pada sinyal yang diberikan oleh manajemen melalui laba yang dilaporkan pada prospektus.

2.3.2 Klasifikasi Manajemen Laba

Klasifikasi manajemen laba menurut Sastradipraja (2010) adalah sebagai berikut :

1. *Cosmetic Earnings Management*

Cosmetic Earnings Management terjadi jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi *cash flow*. Teknik ini merupakan hasil dari kebebasan dalam akuntansi akrual. Akuntansi akrual membutuhkan estimasi dan pertimbangan (*judgement*) yang mengakibatkan manajer memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini

memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas usaha perusahaan yang lebih informatif, namun kebebasan ini juga memungkinkan mereka mempercantik laporan keuangan (*window dress financial statement*) dan mengelola *earnings*.

2. *Real Earnings Management*

Real Earnings Management terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan konsekuensi *cash flow*. *Real Earnings Management* lebih bermasalah jika dibandingkan dengan *Cosmetic Earnings Management*, karena mencerminkan keputusan usaha yang seringkali mengurangi kekayaan pemegang saham.

2.3.3 Strategi Manajemen Laba

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) terdapat tiga jenis manajemen laba yaitu:

1. Meningkatkan laba

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada scenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini, sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah perusahaan melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba agresif sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini seringkali dilaporkan “dibawah laba bersih” (*bellow the line*), sehingga dipandang tidak terlalu relevan.

2. *Big Bath*

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi *big bath* juga

seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada tahun sebelumnya. Oleh karena sifat big bath yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak memperlihatkan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba dimasa mendatang.

3. Perataan laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau "bank" laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

2.3.4 Model Pengukuran Manajemen Laba

Terdapat dua formula dalam *revenue discretionary model* yaitu :

1. *Revenue Model*

Model ini menitik beratkan pada pendapatan yang memiliki hubungan secara langsung dengan piutang.

2. *Conditional Revenue Model*

Model ini dikembangkan kembali dengan adanya penambahan ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*), dan margin kotor (*GRM*) yang diduga dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba akrual mengenai pemberian kredit yang berhubungan dengan piutang. Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan proksi dari kekuatan financial. Umur perusahaan merupakan proksi untuk tahap perusahaan dalam siklus bisnis. Sebagai proksi dari kinerja operasional dari perbandingan perusahaan dengan perusahaan competitor, digunakan *gross margin*.

Revenue Discretionary Model diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Pertama,

keterbatasan model akrual adalah bahwa estimasi *cross-sectional* secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan atau komponen beban, Stubben (2010).

Model pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Conditional Revenue Model* dari Stubben (2010) yang menggunakan piutang akrual daripada akrual agregat sebagai fungsi dari perubahan pendapatan. Sebagai komponen akrual utama, piutang memiliki hubungan empiris yang kuat dan hubungan konseptual langsung pada pendapatan. Dalam penelitiannya terdahulu, Stubben (2010) menemukan bukti bahwa hubungan antara perubahan piutang dan perubahan pendapatan yang lebih besar daripada hubungan antara *current accrual* dan perubahan piutang. *Conditional revenue model* didasarkan pada *revenue discretionary model* yang merupakan perbedaan antara perubahan aktual pada piutang dan perubahan prediksi pada piutang berdasarkan pada model. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah mengindikasikan adanya manajemen pendapatan.

Revenue discretionary model mengambil sejumlah bentuk. Beberapa melibatkan manipulasi aktivitas riil seperti diskon penjualan, kelonggaran persyaratan kredit, *channel stuffing*, dan *bill and hold sales* dan yang lainnya tidak, misalnya pengakuan pendapatan menggunakan agresif atau aplikasi yang salah dari GAAP, pendapatan fiktif dan penangguhan pendapatan. Pengakuan pendapatan lebih awal (*premature revenue recognition*) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. Dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang, Stubben (2010). Dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum terealisasi mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya, Nur'aini (2012).

Stubben (2010) menyatakan bahwa penggunaan model ini dapat mengukur manajemen laba dengan lebih baik dibandingkan dengan pendekatan akrual.

Formula atas *conditional revenue model* seperti yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 \Delta R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 \Delta R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 \Delta R_{it} \times AGE_SQ_{it} + \beta_5 \Delta R_{it} \times GRR_P_{it} + \beta_6 \Delta R_{it} \times GRR_N_{it} + \beta_7 \Delta R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 \Delta R_{it} \times GRM_SQ_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

AR = *Accounts Receivable* (piutang akrual)

R = *Revenue* (pendapatan)

SIZE = Natural log dari ukuran perusahaan (total asset) pada akhir tahun

AGE = Natural log dari Umur perusahaan (dalam tahun)

GRR_P = *Industry median adjusted revenue growth* (= 0 if negative)

GRR_N = *Industry median adjusted revenue growth* (= 0 if positive)

GRM = *Gross margin* (laba kotor) pada akhir tahun

_SQ = *square of variable* (kuadrat dari variable)

Δ = *annual change* (perubahan tahunan)

ϵ = Error

2.4 *Corporate Governance*

Turnbul Report di Inggris (1999) dalam Effendi (2009), mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Pengertian lain dari *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan

corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*, sebaliknya tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Corporate governance merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholders*. Peran tata kelola perusahaan sangat diperlukan untuk mencegah dan menghalangi manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*, sebaliknya tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kontribusi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Wicaksono, 2015). Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit dan komisaris independen.

2.4.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga dengan baik. Roberts dan Yuan (2009) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang lebih ketat terhadap pihak manajemen sehingga mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan kepentingan investor institusional menjadi semakin besar dalam entitas tersebut sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang semakin besar dalam suatu perusahaan akan mengurangi probabilitas terjadinya *fraud* pada laporan keuangan (Anggara, 2014).

Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional Wang *et al.* (2010) mengukur kepemilikan institusional dengan persentase proporsi saham yang dimiliki oleh institusional atau suatu institusi pada akhir tahun dibandingkan dengan total jumlah saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Dian dan Lidyah, 2014:2).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Menurut Nuraina (2012:112) semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan risiko kebangkrutan.

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik (Wiranata dan Nugrahanti, 2013:18). Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Agnes, 2013:4). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen (Dian dan Lidyah, 2014). Dalam kepemilikan ini, manajer perusahaan selain sebagai pengelola juga bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut.

Menurut Widarjo et. al., (2010:10) Manajer dengan kepemilikan saham yang tinggi dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya, apabila kepemilikan saham oleh manajer itu rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan. Hal ini dikarenakan manajer tidak akan melakukan hal yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun manajer akan melakukan hal demi kepentingannya sendiri dengan menggunakan sumber daya perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi

keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut mengganggu kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

2.4.3 Dewan Komisaris

Berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa pengertian dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga investor tetap memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan.

Pada penelitian ini mengukur dewan komisaris dengan menghitung jumlah keseluruhan dewan komisaris (Uzun *et al.*, 2004). Sama halnya yang dilakukan Wanget *al.* (2010) mengukur dewan komisaris dengan menghitung total keseluruhan dewan komisaris pada suatu perusahaan.

2.4.4 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat

fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016:48).

Effendi (2016:48) mengatakan, ketentuan mengenai komite audit BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003. Pasal 70 UU tersebut menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal, yaitu :

- Membantu komisaris atau dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
- Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas lainnya

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan.

2.4.5 Komisaris Independen

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan, Boediono (2005) dalam Suryani (2010).

2.5 Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1. penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Gregorius Satrio Wicaksono (2015)	Mekanisme Corporate Governance dan Kemungkinan Kecurangan dalam Pelaporan keuangan	Dependen : kecurangan dalam pelaporan keuangan Independen : dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, efektivitas audit internal.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan efektivitas audit internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sedangkan ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan

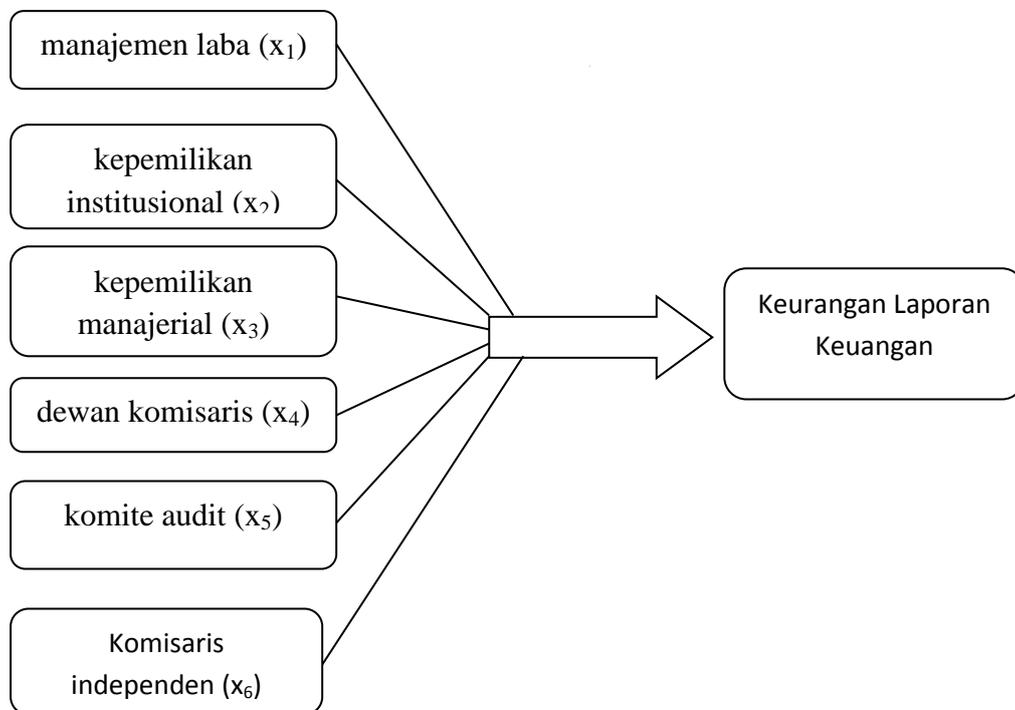
				kecurangan dalam pelaporan keuangan.
2.	Dwi Shinta Mahesari (2015)	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap potensi kecurangan Laporan Keuangan	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan.</p> <p>Independen: jumlah rapat komite audit (MEET), proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP), interaksi kualitas auditor eksternal (AUD).</p>	<p>hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit (MEET) berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, proporsi dewan komisaris (IND), kepemilikan manajerial (OSHIP) dan interaksi kualitas auditor eksternal (AUD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>
3	Ika Listyawati (2016)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement Fraud	<p>Dependen : kecurangan pelaporan keuangan.</p> <p>Independen: <i>financial leverage</i> , Rasio likuiditas, Rasio profitabilitas, Rasio <i>Capital</i></p>	<p>hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio <i>financial leverage</i>, <i>Capital turnover</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Rasio likuiditas, Rasio</p>

			<p><i>Turnover</i>, Dewan komisaris independen, Komite Audit, Klasifikasi auditor eksternal</p>	<p>profitabilitas, komisaris independen, Komite audit, dan Klasifikasi auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.</p>
4	Salim (2017)	<p>Pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan</p>	<p>Dependen : kecurangan laporan keuangan.</p> <p>Independen: Manajemen Laba</p> <p><i>Corporate governance</i>, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen</p>	<p>Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang diukur oleh <i>discretionary accrual</i> dan <i>unexpected revenue per employee</i> membuktikan bahwa adanya pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.</p>

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.6 Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis berikut kerangka pikir teoritis yang menunjukkan pengaruh manajemen laba dan corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan dan dapat digambarkan sebagai berikut:



2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh bonus atas pekerjaan yang dilakukan. Agar manajer mendapatkan bonus atas

pekerjaannya, manajer akan melakukan manajemen laba karena laba merupakan penilaian kinerja manajer. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, dimana masing-masing pihak akan berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang diharapkan (Ujiyantho, 2007).

Perusahaan yang menggunakan akrual untuk menaikkan pendapatan harus bersiap dengan konsekuensi dari tindakannya ketika menemui hambatan fleksibilitas dalam manajemen laba. Salah satu konsekuensinya adalah harus melakukan *fraud* untuk menutupi atau meringankan akun akrual yang telah dimanipulasi dalam rangka mencapai tujuannya (Puspatri snanti dan Fitriany, 2014). Pendapatan yang meningkat dengan tidak wajar yang disajikan pada laporan keuangan akan mengindikasikan probabilitas terjadinya kecurangan dalam akun pendapatan. Namun, pengukuran pendapatan masih kurang valid dalam mendeteksi kecurangan sehingga perlu adanya modifikasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan penggunaan sumber daya seperti aset (produktivitas modal) dan karyawan (produktivitas tenaga kerja) yang dapat memberi sinyal kemungkinan terjadinya kecurangan (Perols dan Barbara, 2011).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H1: Manajemen Laba berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga *agency cost* dan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan manajer di dalam perusahaan semakin berkurang.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Penelitian Roberts dan Yuan (2009) yang mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan insentif untuk melakukan pengawasan atau *monitoring* yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen sehingga kemungkinan manajemen untuk melakukan *fraud* pada laporan keuangan akan semakin kecil.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen dalam menselaraskan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak hati-hati, karena ikut menanggung konsekuensi atas tindakanya. Kebijakan manajemen yang dibuat dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi dengan adanya sebagian saham yang dimiliki oleh eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini, pihak agen (manajer) akan mendapat tekanan untuk lebih hati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Kepemilikan manajerial dapat ditunjukkan dari ada tidaknya kepemilikan saham oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam dianggap dapat mengatasi permasalahan agensi, karena dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam akan menyejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Menurut penelitian Chen et al. (2006), semakin tinggi persentase kepemilikan saham yang dimiliki orang dalam, maka kemungkinan terjadinya fraud semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan.

2.7.4 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung atas jawab pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Tugas pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa pengertian dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi good corporate governance. Dalam konteks informasi keuangan, mereka bertanggung jawab atas transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan karena mereka memiliki tingkat pengendalian tertinggi dalam suatu organisasi. Vafeas Vafeas (2005) berpendapat bahwa ukuran dewan terlalu kecil dan terlalu besar tidak efektif. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa tanggung jawab kurang diambil oleh ukuran dewan yang besar dan terlalu banyak kewajiban untuk ukuran dewan yang kecil. Hasil penelitian Nasution dan Setyawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan

komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Abbot, Taman, dan Parker (2000) dalam Razali dan Arshad (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran dewan dan pemantauan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H4: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.7.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif (Tjager dkk., 2003).

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Adanya independensi komite audit mampu meminimalkan tindakan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan karena komite audit yang independen tidak akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou (2001) dan Skousen et al. (2009) menemukan bahwa komite audit berpengaruh dengan terjadinya kecurangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H5: Komite Audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.7.6 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) Nomor: Kep.315/BEJ/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat pada butir mengenai Ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu :

H6: Komisaris Independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.